

Polres Metro Jakarta Barat:

Melaju dengan 3KU

Kombes Pol. Roycke Harry Langie, SIK., MH.

JPMJI-17-002

Kepolisian Metro Jakarta Barat merupakan wilayah padat penduduk dan pusat bisnis. Karakter wilayah seperti ini sangat rawan tindak kejahatan premanisme, pemaksaan dengan kekerasan dan pencurian. Jakarta Barat juga dikenal sebagai wilayah peredaran narkoba yang besar. Banyak kasus narkoba terungkap di wilayah ini.

Polres Metro Jakarta Barat telah menyoroti titik-titik rawan premanisme di wilayah ini. Pemerasan oleh kelompok penguasa wilayah, baik dengan motif sengketa lahan maupun pemalakan terhadap pedagang sering terjadi di wilayah ini. Lokasi titik temu (meeting point) preman kerap berubah. Untuk itu, polisi membutuhkan dukungan masyarakat bersama-sama memberantas premanisme.

Titik Premanisme

Sebagai pusat bisnis, wilayah Jakarta Barat sering mengalami kasus premanisme. Berbagai tindak penipuan dan pemaksaan dengan kekerasan kerap terjadi. Melalui 3KU, Polres Jakarta Barat mengidentifikasi titik-titik kerawanan. Kerjasama dengan masyarakat diutamakan demi mendapat dukungan dan informasi lebih cepat.

Selain premanisme, kasus menonjol di wilayah Jakarta Barat adalah persoalan narkoba. Dalam satu bulan, setidaknya ada sekitar 40 kasus narkoba. Berikut adalah titik-titik rawan premanisme yang tersebar di delapan kecamatan yang ada di Jakarta Barat:

1. Kecamatan Cengkareng, terletak di Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, Kedaung Kali Angke, Duri Kosambi.
2. Kecamatan Kembangan, terletak di Jalan Kav DKI Jalur 15, Pasar Taman Aries, dan Jalan Raya Meruya.

3. Kecamatan Kebon Jeruk, terletak di Perumahan Kopilas (kawasan Joglo).
4. Kecamatan Tambora, terletak di Jalan Gedong Panjang dan Jalan Tubagus Angke.
5. Kecamatan Tamansari, terletak di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Mangga Besar Raya, dan Jalan Tamansari Raya.
6. Kecamatan Tanjung Duren, terletak di Jalan Tanjung Duren Raya dan Jalan S Parman (depan Mall Taman Anggrek-depan Telkom).
7. Kecamatan Palmerah, terletak di Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Kemanggisan Raya.
8. Kecamatan Kalideres, terletak di Kelurahan Tegal Alur dan kawasan sekitar Terminal Kalideres.

3KU untuk Jakarta Barat Melaju

Untuk mengatasi kerawanan-kerawanan ini, Polres Jakarta Barat menjalankan Program 3KU. Program ini terdiri dari: Kuasai Wilayah; Kuasai Potensi dan Kuasai Informasi.

KU yang pertama adalah kuasai wilayah. Penguasaan wilayah wajib demi keberhasilan tugas. Menguasai wilayah itu termasuk di antaranya mengenali karakteristik masyarakat. Konsep menguasai wilayah sejalan dengan harapan Kapolri yaitu

Penyesuaian tindakan akan dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan. Jika terdapat banyak pelanggaran, tindakan represif akan dilakukan.



menekan budaya koruptif dan sejalan juga dengan program Kapolda yaitu peka. Keberhasilan menguasai wilayah menjadi kunci pada program KU yang pertama.

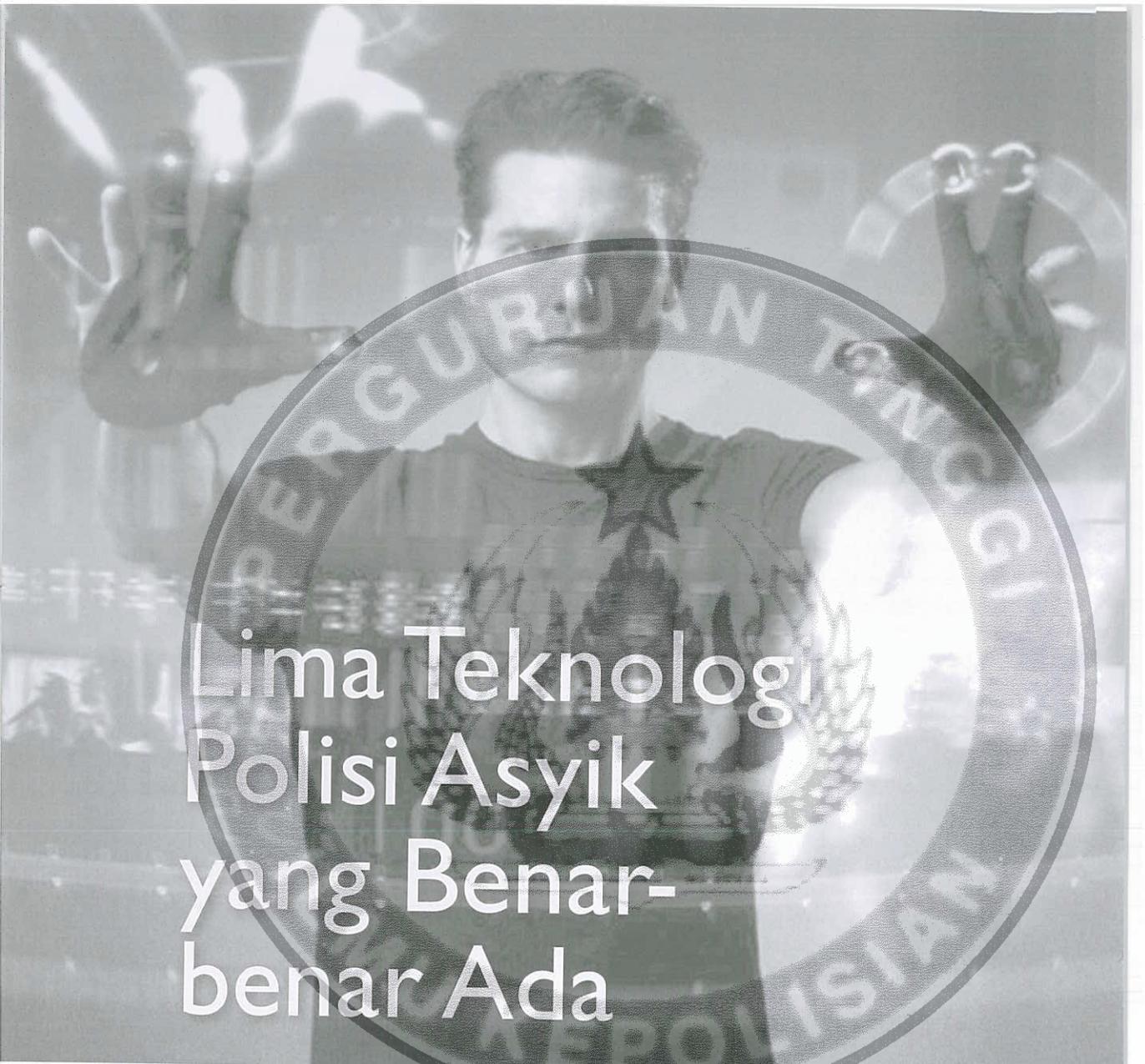
KU yang kedua adalah kuasai potensi. Potensi di sini dimulai dari SDM, peralatan, anggaran. Hal ini juga sejalan dengan program prioritas Kapolri, yaitu melakukan peningkatan dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Peningkatan kemampuan penting, terutama bagi personel agar tugas dilaksanakan dengan tepat sasaran. Keberhasilan mengelola SDM, anggaran dan kegiatan menjadi pokok pada program KU yang kedua.

KU yang ketiga adalah kuasa informasi. Hal ini sejalan juga dengan program Kapolri, yaitu manajemen media informasi. Pengelolaan informasi dilaksanakan dengan tidak menganggap remeh informasi sekecil apapun. Terlebih,

dengan maraknya persebaran berita hoax. Penyampaian pesan-pesan baik melalui jalur informasi juga penting dilakukan. Hal ini agar pesan-pesan Kamtibmas dapat diserap dengan baik oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak terpengaruh ajakan-ajakan atau ujaran-ujaran kebencian yang selama ini berdesakan di media.

Kesiapan Pengamanan Pilkada

Situasi panas jelang dan pasca Pilkada merupakan ujian kesiapan bagi kepolisian. Menyangkut keamanan selama Pilkada DKI ini, Polres Metro Jakarta Barat sangat siap. Penyesuaian tindakan akan dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan. Jika terdapat banyak pelanggaran, tindakan represif akan dilakukan. Tetapi tindakan preventif dengan penyuluhan, himbuan, ajakan dan pesan-pesan Kamtibmas selalu didahulukan. (*)



Lima Teknologi Polisi Asyik yang Benar- benar Ada

BAGI SIAPAPUN yang ingin berkarir sebagai aparat penegak hukum pasti akan terkejut dengan perkembangan teknologi dalam kerja polisi. Teknologi-teknologi digital baru mengubah cara polisi dalam 'melindungi dan mengayomi' dan membuat petugas mencegah kejahatan secara lebih efektif, juga menyelesaikan kasus lebih cepat.

Perkembangan teknologi ini bisa dilacak dari novel-novel fiksi ilmiah dan dicangkokkan ke departemen kepolisian. Beberapa teknologi ini sangat sulit dipercaya. Dari pesawat tanpa awak (drone) sampai perlengkapan elektronik canggih, berikut lima teknologi menakjubkan yang mengubah cara polisi bekerja.



Drone Polisi

Aparat penegak hukum menggunakan drone untuk berbagai fungsi. Penggunaan teknologi ini memberikan solusi biaya murah yang efektif membantu aparat dalam situasi yang secara potensial membahayakan. Seperti adegan dalam sebuah film laga, drone tanpa awak mengangkasa membantu segala bentuk kejadian dari misi penyelamatan, patrol sampai membantu pencarian anak hilang. Saat kemampuan teknologi drone berkembang pesat, penggunaannya oleh aparat penegak hukum berkembang menjadi pengumpulan informasi-informasi penting tentang kejahatan yang coba diungkap.

Perangkat lunak analitik-prediktif

Bayangkan polisi mampu memperkirakan di mana dan jam

berapa kejahatan selanjutnya akan terjadi. Bukan, ini bukan seperti alur drama jejaring kejahatan baru. Teknologi ini nyata dan digunakan oleh penegak hukum untuk menemukan pola dan tingkahtaku kejahatan. Nama programnya PredPol, yang mengizinkan departemen kepolisian untuk memperkirakan kapan dan di mana kejahatan khusus akan terjadi. Perangkat lunak ini akan menghubungkan petugas secara waktu-nyata. Menggunakan teknologi ini, dinas kepolisian akan menyaksikan efisiensi pergeseran anggota dan pemotongan kejahatan secara dramatis.

Sidik Jari Otak

Menetapkan bersalah atau tidak berdasarkan pemindaian gelombang otak? Brainwave Science, telah mengembangkan teknologi

Perkembangan teknologi ini bisa dilacak dari novel-novel fiksi ilmiah dan dicangkokkan ke departemen kepolisian.

yang membantu polisi untuk melakukan hal tersebut. Sidik jari otak menggunakan pemindaian otak untuk menangkap bagaimana otak terduga kejahatan bereaksi ketika diselidik oleh polisi dan menentukan apakah orang yang diinterogasi itu mengingat benda atau situasi khusus. Polisi kemudian bisa secara memungkinkan mengenali atau menghilangkan terduga berdasarkan hasil pemindaian ini.

Pemindai Sidik Jari Genggam

Hari-hari terduga kejahatan dilakukan sidik jari dengan tinta keunguan yang berantakan itu sudah berakhir. Para petugas polisi kini dapat menggunakan pemindai portable genggam ini untuk secara langsung melakukan pemindaian sidik jari dan mengenali orang-orang dengan catatan kejahatan. Dengan akses langsung kepada sejarah kejahatan terduga, perangkat genggam ini menghemat waktu kerja polisi selama pencatatan awal dan mengurangi jumlah salah tangkap.

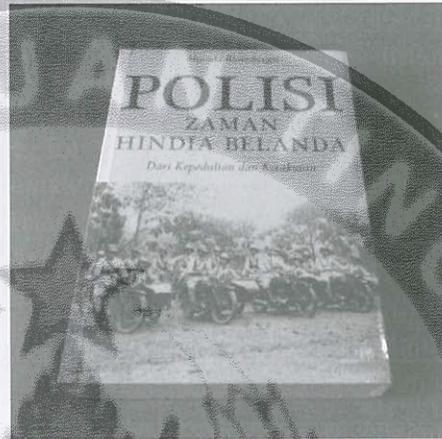
Kacamata Google

Lain kali Anda ngebut di jalanan, hati-hati! Menggunakan perangkat lunak yang secara khusus dirancang untuk Google Glass (Kacamata Google), para petugas polisi bisa mengambil foto pelanggaran lalu lintas dan langsung mengunggahnya ke system yang ada di departemen kepolisian. Foto-foto itu menangkap tanggal, waktu dan tempat di mana gambar diambil bersama dengan plat kendaraan. Jadi waspadalah! Bahkan ketika polisi tidak bisa menangkap Anda, lembar tilang boleh jadi dikirimkan melalui surat ke alamat Anda.

Kelima contoh teknologi ini menggambarkan bagaimana teknologi berkembang pesat dan mengubah cara kerja penegak hukum. Sampai beberapa tingkatan, teknologi kepolisian teknologi berkembang, juga menciptakan kesempatan-kesempatan baru bagi mereka yang tertarik dalam profesi polisi. Meski kemajuan-kemajuan ini membuat kepolisian berjalan dengan efektif, mereka juga meningkatkan kebutuhan bagi para pemikir kreatif dan analitik yang mampu menggunakan teknologi demi melindungi dan mengayomi masyarakat.

Sumber: cjonline.uc.edu/resources/news/five-fascinating-police-technologies-that-really-exists/ (*)

Judul: Polisi Zaman Hindia Belanda
Penulis: Marieke Bloembergen
Penerbit: Kompas, Jakarta
Tahun: I, Januari, 2011
Tebal: xlv+540 halaman



Terbentuknya Kepolisian di Zaman Hindia Belanda

Sejarah kepolisian Republik Indonesia bisa dilacak sampai ke masa Hindia-Belanda. Untuk mengatasi tingkat kriminalitas pada era Hindia Belanda, kepolisian dibentuk. Pembentukan ini didasari oleh kepedulian dan ketakutan. Sejarah kepedulian ini terkait dengan kepentingan negara induk (Belanda) untuk tetap mempertahankan legitimasi kekuasaannya di negara koloni dengan mengupayakan kebijakan progresif (politik etis) yang lebih manusiawi dan beradab serta meninggalkan kebijakan konservatif (eksploitasi) yang tidak manusiawi.

Menelusuri kronik kepolisian hindia Belanda, Marieke Bloembergen mencoba mengungkap

dan menganalisis sebab-sebab terbentuknya kepolisian, reorganisasi, kerja serta kinerjanya, hingga terbentuk apa yang disebut sebagai "polisi ideal" atau "polisi modern" (negara polisi) mengikuti model polisi Eropa dengan segala persoalan yang dihadapi pada tahapan implementasi kebijakan kepolisian di lapangan. Buku ini melihat kepolisian Hindia Belanda dari perspektif kepentingan pemerintah kolonial.

Dalam buku ini, kita bisa membaca tiga reorganisasi kepolisian yang menjadi titik penting perubahan kepolisian. Reorganisasi pertama dilakukan pada 1897. Dilandasi oleh prinsip dualisme antara pemerintah

kolonial dan pemerintah pribumi, reorganisasi pertama dilakukan. Pada reorganisasi ini, pemerintah kolonial memutuskan tidak turut campur urusan pemerintah dalam negeri. Dengan begitu, urusan kepolisian, sebagian besarnya, diserahkan pada pemerintah lokal. Namun, tidak berarti pemerintah dalam negeri benar-benar lepas dari pemerintah kolonial.

Reorganisasi kedua dilakukan pada 1912-1914. Reorganisasi kedua ini dilandasi oleh semangat politik etis, dengan prioritas upaya menyejahterakan rakyat, sekaligus memperkuat pemerintah kolonial. Di era ini, model kepolisian ideal (modern) dan profesional serta tersentralisasi dengan mengikuti model polisi Eropa coba dibentuk. Ada tiga sentra kepolisian sebagai wujud reorganisasi ini, yaitu di Batavia (Jakarta), Semarang, dan Surabaya.

Reorganisasi ketiga dilakukan pada 1918-1920. Selain untuk

kepentingan idealisasi (modernisasi) kepolisian, reorganisasi ketiga ini diorientasikan untuk memperkuat kendali atas masyarakat pribumi yang makin aktif muncul dalam wadah-wadah pergerakan sosial politik revolusioner.

Sejak reorganisasi ketiga inilah kepolisian semakin memperkuat pengawasan hingga ke tingkat paling bawah dengan membentuk polisi lapangan (*veld politie*). Dengan reorganisasi ini, pemerintah kolonial berkembang menjadi negara polisi yang kerap mengambil jalan kekerasan untuk mengatasi persoalan. Dalam buku ini, Bloembergen cenderung melihat negara kolonial tengah mengalami masalah legitimasi dan menggambarkan wajah sesungguhnya negara kolonial yang tidak berdaya, takut, dan cemas. Pada intinya, pembentukan dinas kepolisian di era Hindia Belanda adalah untuk mengukuhkan kekuasaan penjajah atas pribumi. (*)





Membangun Hubungan

Baik dengan Komunitas

HUBUNGAN DIALEKTIS antara Kepolisian dan masyarakat diberbagai belahan dunia banyak mengubah praktek pemolisian yang dijalankan oleh mereka. Salah satu yang mengemuka adalah tumbuh dan berkembangnya strategi Community Policing yang dijalankan oleh berbagai Kepolisian di negara-negara lain. Community Policing tidak lagi dijalankan untuk kepentingan Institusi Kepolisian belaka seperti untuk meningkatkan kemampuan pengungkapan kejahatan serta menekan gangguan kamtibmas yang terjadi, melainkan Kepolisian diajak untuk terlibat langsung menangani permasalahan yang muncul pada komunitas.

Di Indonesia kesadaran tersebut mulai muncul kalangan praktisi Kepolisian seiring dengan semakin berkembangnya kemampuan dan pengetahuan para



pimpinan Kepolisian serta para personel Kepolisian itu sendiri.

Community Policing secara umum bisa juga diartikan sebagai bentuk pemolisian yang lebih menekankan kepada Pembinaan Kamtibmas. Program Pembinaan Kamtibmas itu sendiri dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu perspektif kepolisian, perspektif masyarakat, dan perspektif kepolisian maupun masyarakat.

Community Policing secara umum bisa juga diartikan sebagai bentuk pemolisian yang lebih menekankan kepada Pembinaan Kamtibmas.

Pertama, dari perspektif kepolisian, polisi melihat bahwa ada kebutuhan yang semakin besar dalam institusinya untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat dengan tujuan-tujuan seperti adanya kebutuhan dalam rangka memanfaatkan berbagai sumberdaya masyarakat untuk membantu upaya mencegah kejahatan dan mengurangi tingkat kecemasan masyarakat terhadap kejahatan.

Selain itu dalam perspektif kepolisian, polisi juga mempunyai tujuan dalam rangka memperkuat basis bagi deteksi dini serta pengumpulan informasi guna pengungkapan sebuah peristiwa gangguan kamtibmas. Sedangkan tujuan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya upaya-upaya kepolisian dalam rangka



meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

Sedangkan yang kedua dari perspektif masyarakat, mereka menyadari kedepan semakin membutuhkan dan bahkan layak mendapatkan layanan yang lebih baik dari aparat kepolisian. Selain itu mereka juga membutuhkan adanya akuntabilitas kepolisian yang handal selain bahwa mereka mulai menyadari sudah selayaknyalah mereka mendapatkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dibidang keamanan.

Adapun yang ketiga dari perspektif kepolisian maupun masyarakat, terdapat asumsi bahwa program pembinaan kamtibmas didasari atas beberapa anggapan, antara lain:

- Asumsi yang pertama adalah

adanya anggapan bahwa kejahatan terjadi akibat faktor-faktor sosial yang relatif tidak terlalu dikuasai oleh kepolisian.

- Sedangkan asumsi yang kedua, adanya kebutuhan pencegahan kejahatan perlu dipusatkan kepada faktor-faktor sosial penyebab kejahatan.

- Asumsi ketiga, adanya keperluan untuk mengembangkan sikap proaktif untuk menggantikan kebijakan kepolisian yang bersifat reaktif.

- Asumsi keempat, adalah adanya prasyarat berupa desentralisasi wewenang pada kebijakan kepolisian yang berwawasan sosial dan budaya.

- Asumsi berikutnya adalah adanya anggapan bahwa isu-isu tradisional berupa kejahatan

dan kecemasan terhadap kejahatan sudah mulai harus lebih dititikberatkan kepada isu kualitas hidup.

- Sedangkan asumsi terakhir dan yang terpenting yang mendasari perspektif ini adalah adanya hak asasi dan kebebasan individu merupakan pertimbangan yang paling esensial dalam kepolisian yang demokratis.

Secara lebih sederhana, kegiatan pembinaan kamtibmas dengan community policing sebagai basisnya merupakan suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara lebih efektif dan efisien, mengurangi kecemasan masyarakat terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian dan kepercayaan terhadap

polisi, dalam jalinan kerjasama yang lebih proaktif dengan sumberdaya-sumberdaya masyarakat yang menginginkan perubahan bagi kondisi-kondisi penyebab kejahatan. Dalam kaitan dengan itu tentunya dibutuhkan serta diperlukan Polisi yang lebih handal, peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, dan perhatian yang lebih besar terhadap asasi dan kebebasan individu.

Berkaitan dengan peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan inilah, maka Kepolisian perlu membuat langkah terobosan yang bersifat sistematis dengan menggandeng mereka dalam sebuah kelompok komunitas yang bersifat proaktif dalam masalah keamanan. Kelompok komunitas yang bersifat proaktif ini yang kemudian kita kenal



sebagai “Program Pemberdayaan Masyarakat”.

Program Pemberdayaan Masyarakat harus didefinisikan dengan jelas tujuannya. Hanya dengan tujuan yang jelas, maka kita bisa mengukur keberhasilan program tersebut. Adapun tujuan inti dari program ini adalah meningkatkan kepercayaan dan kedekatan antara polisi dengan masyarakat khususnya masyarakat yang sadar kamtibmas guna mendukung terciptanya keamanan dalam negeri yang lebih kondusif. Tujuan penting lainnya adalah menekan terjadinya kriminalitas dan meningkatkan pengungkapan kejahatan melalui partisipasi para anggota Program Pemberdayaan Masyarakat, serta meningkatkan Public Image dan Public Relation Kepolisian.

Disisi lain Program Pemberdayaan Masyarakat dapat menciptakan database yang valid dari para anggota-anggotanya dalam rangka mendukung berbagai kegiatan perpolisian, serta dapat memberikan peluang komunikasi yang terbuka antara Kepolisian dan masyarakatnya. Oleh karenanya penting sekali disadari bersama bahwa buah dari Program Pemberdayaan Masyarakat tidak bisa dipetik dalam waktu singkat, namun Program ini harus dilihat lebih sebagai alat untuk membangun hubungan jangka panjang dengan stake holder Kepolisian.

Program Pemberdayaan Masyarakat tidak bisa dipetik dalam waktu singkat.

Dalam konteks itulah, buku ini ditulis dalam rangka memberikan gambaran tentang upaya mempercepat Implementasi Community Policing pada Kepolisian melalui Optimalisasi Pemberdayaan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PPM). Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bukan hanya bagi para manajer-manajer Kepolisian, namun juga kepada seluruh anggota Kepolisian dan parawarga masyarakat dalam rangka memahami dan mengimplementasikan Community Policing di lingkungannya. (*)

